

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara membawa perubahan signifikan terhadap orientasi dasar Perusahaan Umum yang semula berfokus pada pelayanan publik menuju orientasi ganda, yakni sosial dan komersial. Perubahan ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan potensi pertentangan antara orientasi komersial Perum dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok guna memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian transformasi komersial pada Perum apakah mengalami pertentangan dengan orientasi dasar Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan menganalisis bagaimana harmonisasi ketentuan Pasal 36 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi dan kesesuaian orientasi komersial Perum menimbulkan dualisme tujuan yang berimplikasi pada pertentangan dengan norma dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam praktiknya orientasi keuntungan lebih dominan dibanding fungsi sosial. Selain itu, analisis harmonisasi atas Pasal 36 huruf a dan b memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tercipta keharmonisan, fungsi sosial harus ditempatkan sebagai tujuan utama sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar.

Kata Kunci: Orientasi, Komersial, BUMN, Perum,

ABSTRACT

Law number 1 of 2025 concerning State Owned Enterprises introduces significant changes to the fundamental orientation of Public Corporation, which were originally focused on public service, toward a dual orientation of both social and commercial functions. This shift raises legal issue, particularly regarding the potential conflict between the commercial orientation of Public Corporations and the principle of a people's economy as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution. Based on this context, this research formulates two main problem: first, to examine whether the commercial transformation of Public Corporation under Law number 1 of 2025 contradicts the fundamental orientation of State Owned Enterprises, and second, to analyze how to provisions of Article 36 letters a and b of the law can be harmonized with the 1945 Constitution.

This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The data used consist of primary, secondary materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation.

The results of the research show that the transformation and alignment of the commercial orientation of Public Corporations create a dualism of objectives, which implies a conflict with the fundamental norms of the 1945 Consitution, as a profit orientation tends to dominate over social functions in practice. Futhermore, the harmonization analysis of Article 36 letters a and b indicates that these provisions are not yet fully consistent with the 1945 Constitution. To achieve harmony, the social function must be prioritized as the primary objective, as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution as a fundamental norm.

Keywords: *Orientation, Commercial, State-Owned Enterprises, Public Corporation*